Golkar Setuju 15 Mei 2024 Jadi Waktu Pemungutan Suara Pemilu

JAKARTA (IM) - Partai Golkar setuju usulan pemerintah yang menginginkan pemungutan suara Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 dilakukan pada 15 Mei 2024.

"Kalau Partai Golkar sudah setuju," kata Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, saat ditemui di Senayan, Jakarta, Selasa (28/9).

Ia mengatakan bahwa kesepakatan tersebut didapat melalui sejumlah rapat internal DPP Golkar. Rapat tersebut, juga dihadiri oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.

Doli mengatakan, Airlangga juga sepakat terhadap usulan pemerintah tersebut. Namun, Doli tidak menjelaskan alasan Golkar menyetujui usulan pemerintah terkait jadwal pemungutan suara itu.

"Kami kemarin rapat, tadi malam rapat pleno. Saya sampaikan di rapat pleno dan dua kali malah. Hari Sabtu rapat harian terbatas saya sampaikan juga. Kemudian tadi malam rapat pleno saya sampaikan, Ketua Umum setuju dan semua menyatakan setuju tanggal 15 Mei," katanya.

Kendati demikian, pernyataan tersebut mewakili partai yang menaunginya yaitu Partai Golkar. Ia menegaskan, tentunya pendapat tersebut tidak mengatasnamakan dirinya sebagai Ketua Komisi II DPR.

Menurutnya, Komisi II baru akan membahas usulan pemerintah dan mengambil sikap itu dalam rapat konsinyering.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan, pemerintah mengusulkan pelaksanaan Pilpres dan Pemilu 2024 berlangsung pada 15 Mei.

Keputusan tanggal tersebut berdasarkan hasil rapat bersama sejumlah menteri dengan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden di Istana Negara, Jakarta, Senin (27/7). "Pilihan pemerintah adalah tanggal 15 Mei (2024)," ujar Mahfud dalam keterangan video, Senin kemarin. ● **mei**

12 Kepala Daerah di Jambi Komit akan Berantas Korupsi

JAKARTA (IM) – Sebanyak 12 kepala daerah di Provinsi Jambi tandatangani komitmen bersama akan memberantas korupsi di Tanah Pilih Pesako Betuah.

Mereka akan komit mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme (KKN) melalui program pemberantasan korupsi terintegrasi.

Dalam pernyataan komitmen bersama itu meliputi delapan poin yang harus dilaksanakan oleh 12 kepala daerah yang ada di Provinsi Jambi, yaitu:

1. Memperbaiki dan memperkuat sistem dan tata kelola pemerintahan daerah dengan mengacu pada Monitoring Center for Prevention (MCP) yang dikoordinasikan dan dimonitor evaluasi oleh KPK;
2. Perencanaan, penganggaran, realisasi keuangan dalam tata kelola pemerintah daerah yang mengutamakan kepentingan dan kemanfaatan publik;
3. Proses pengadaan barang dan jasa yang bersih, profesional dan akuntabel, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme;
4. Penertiban, pemulihan dan pengamanan seluruh aset milik pemerintah daerah;
5. Penguatan pengawasan dan pengendalian dalam tata kelola pemerintah daerah;
6. Pembangunan sistem pengaduan masyarakat melalui Whistleblowing System (WBS) terintegrasi dengan KPK;
7. Melaksanakan kegiatan penanganan Covid-19 dengan transparan, akuntabel dan bebas dari korupsi; dan
8. Mencegah korupsi di sektor pendapatan asli daerah dan mengoptimalkan potensi PAD

Penandatanganan komitmen bersama ini menjadi salah satu rangkaian kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) Pencegahan Korupsi se-Provinsi Jambi yang dihadiri langsung Ketua KPK Firli Bahuri dan jajaran Direktorat Korsup Wilayah I KPK, di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi, Senin 27 September 2021.

KPK berharap upaya-upaya pencegahan korupsi melalui perbaikan sistem pada tata kelola pemerintahan daerah yang meliputi delapan area intervensi dan pembangunan sistem integritas melalui pendidikan serta penerapan whistle blowing system dapat memperkuat upaya pencegahan korupsi di Jambi. ● **han**

PENGUMUMAN

Kami, Direksi **PT Grya Catur Abadi**, berkedudukan di Jakarta Pusat ("**Perseroan**"), dengan ini memberitahukan bahwa berdasarkan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Perseroan, yang dibuat di bawah tangan, tertanggal 10 September 2021, para Pemegang Saham Perseroan telah mengambil keputusan sebagai berikut:

Menyetujui untuk mengeluarkan saham baru Perseroan sebanyak 16.600.000 (enam belas juta enam ratus ribu) lembar saham yang akan diambil bagian oleh PT Persada Among Bangun selaku Pemegang Saham Perseroan dengan cara konversi utang Perseroan kepada Pemegang Saham.

Demikianlah pengumuman ini dibuat untuk memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 6 PP No 15 Tahun 1999 tentang Bentuk-Bentuk Tagihan Tertentu yang Dapat Dikompensasikan Sebagai Setoran Saham.

Jakarta, 29 September 2021
Direksi Perseroan

IDN/ANTARA

KUNKER MENTERI KESEHATAN DI PONTIANAK

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin (kedua kiri) didampingi Gubernur Kalbar Sutarmidji (ketiga kiri) meninjau pameran di Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan (Poltekkes Kemenkes) di Pontianak, Kalimantan Barat, Selasa (28/9). Dalam kesempatan tersebut Menteri Kesehatan menyatakan dalam dua hari ini pihaknya akan mendatangkan 400 ribu vaksin ke Kalbar untuk memenuhi kebutuhan vaksinasi masyarakat di daerah setempat.

2004 - 2021, Komnas Perempuan Catat 544.452 Kekerasan dalam Rumah Tangga

Dalam lima tahun terakhir, 36.367 kasus KDRT. Kekerasan terhadap istri selalu menempati urutan pertama dari keseluruhan kasus KDRT/RP. Jumlahnya di atas 70 persen.

JAKARTA (IM) - Komisi Nasional Antikekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mencatat, selama 17 tahun, yaitu sepanjang 2004-2021 ada 544.452 kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) atau ranah personal.

Ketua Komnas Perempuan Andy Yentriyani mengatakan, kasus-kasus yang tercatat itu meliputi kekerasan terhadap istri (KTI), kekerasan terhadap anak perempuan (KTAP) khususnya inses. Ada juga dalam bentuk kekerasan terhadap pekerja rumah tangga (PRT), kekerasan dalam pacaran (KDP), kekerasan relasi personal lainnya, kekerasan mantan pacar (KMP), dan kekerasan mantan suami (KMP).

Sementara itu, secara khusus selama lima tahun terakhir, terdapat 36.367 kasus KDRT dan 10.669 kasus ranah personal. Andy mengungkapkan, dari jenis-jenis KDRT, kekerasan terhadap istri selalu menempati urutan pertama dari keseluruhan kasus KDRT/RP dan selalu berada di atas angka 70 persen.

"Sedangkan yang paling minim dilaporkan adalah kekerasan terhadap PRT. Hal ini juga tidak dapat lepas dari penyempitan makna bahwa KDRT adalah kekerasan terhadap istri," kata Andy dalam keterangan persnya, Selasa (28/9).

Andy mengatakan, KDRT menimbulkan ketakutan, penderitaan berat, hingga gangguan psikososial pada korban. Selain itu, korban juga bisa menjadi disabilitas, memiliki keinginan bunuh diri, trauma berkepanjangan, dan hilangnya rasa percaya diri.

Karena itu, lanjut dia, korban membutuhkan pemulihan komprehensif sebagaimana telah diatur dalam UU Penghapusan KDRT Nomor 23 Tahun 2004. Andy pun mengatakan, UU Penghapusan KDRT telah membawa kemajuan berupa terbentuknya struktur aparatur penegak hukum atau masyarakat sipil yang secara khusus dibentu untuk menangani kasus KDRT, seperti UUPA, P2TP2A, dan Women Crisis Center (WCC) atau lembaga Pendampingan Korban yang dikelola oleh masyarakat.

"Namun, pelaksanaan UU PKDRT sendiri masih menemui sejumlah hambatan yang memastikan korban mendapatkan keadilan dan pemulihan," tuturnya.

Hambatan itu, antara lain, tingginya korban yang mencabut laporan/pengaduan serra penafsiran terhadap Pasal 2 tentang ruang lingkup rumah tangga dalam UU PKDRT, khususnya perkawinan tidak tercatat.

Selain itu, aparat penegak hukum belum memiliki perspektif korban dan hak asasi perempuan dan belum maksimalnya penjatuhan pidana tambahan pembatasan gerak pelaku, pembatasan hak-hak tertentu dan mengikuti program konseling.

Sementara, Komisioner Komnas Perempuan Siti Aminah Tardi mengatakan, untuk memutus rantai kekerasan dan memulihkan korban, Komnas Perempuan meminta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Membangun skema nasional aksi penghapusan KDRT di Indonesia.

Kemudian, meminta Kementerian PPPA menguatkan koordinasi dengan aparat penegak hukum, Komnas Perempuan, serta instansi terkait. Berikutnya, meminta Mahkamah Agung menerapkan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dalam memeriksa kasus-kasus perceraian dengan alasan- alasan KDRT.

Komnas Perempuan meminta agar polisi mengutamakan penegakan hukum dan membangun standar norma untuk kasus yang dapat diselesaikan secara restorative justice dalam penyelesaian kasus KDRT.

Selain itu, meningkatan proses penanganan berkoordinasi dengan lembaga-lembaga layanan korban KDRT dan menguatkan kapasitas penyelidik dan penyidik tentang KDRT sebagai kekerasan berbasis gender. ● **han**

Mobilitas Tanpa Prokes yang Ketat Akan Tingkatkan Penularan Covid-19

JAKARTA (IM) - Ahli Biostatistik, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia Iwan Ariawan mengatakan, mobilitas masyarakat tanpa dIiringi penerapan protokol kesehatan (prokes) yang ketat, sangat mempengaruhi tingkat penularan virus Corona.

"Pengalaman kita selama setahun lebih, pandemi ini selalu kalau ada peningkatan mobilitas kemudian dua minggu, sebulan sampai dua bulan kemudian kasusnya naik," kata Iwan dalam diskusi secara virtual melalui kanal YouTube BNPB, Selasa (28/9).

Meski kasus Covid-19 saat ini sudah menurun, Iwan tetap berharap, pelonggaran aktivitas masyarakat di ruang publik harus dilakukan dengan perlahan dan hati-hati. Ia mengingatkan, semakin banyak terjadi penularan virus corona di antara masyarakat, virus pun akan berkembang biak dan menimbulkan mutasi baru.

"Nah mutasi bisa jadi masalah, kalau varian barunya lebih menular, semakin parah atau dia lari dari antibodi, enggak mempan vaksin," ujar Iwan.

Sebab itu, agar penularan virus dapat ditekan, maka pemerintah harus menjaga mobilitas masyarakat, terutama mobiltas masyarakat antar negara. Meski penerbangan internasional sudah dibatasi, pemerintah jangan sampai kecolongan terhadap mobilitas masyarakat melalui jalan-jalan tikus, terutama di daerah perbatasan.

"Semua pendatang dari mancanagera harus di periksa PCR, jadi kita tidak lagi percaya saja dengan hasil PCR yang negatif yang sudah dibawa oleh si pendatang," ucap Iwan..

Tentu kesadaran masyarakat untuk selalu menerapkan prokes 3M (memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak) juga sangat penting. Masyarakat selalu disiplin menerapkan 3M, terutama saat berada di luar rumah.

Selain menerapkan prokes 3M, masyarakat juga harus menerapkan 2 M Lagi, yaitu menghindari kerumunan dan membatasi Mobilitas. Sehingga jika tidak ada urusan yang sangat penting, masyarakat lebih baik di rumah saja. ● **ber**

Mabes TNI AD Distribusikan 353 Unit Kendaraan Dinas

JAKARTA (IM) - Markas Besar TNI Angkatan Darat mendistribusikan 353 unit kendaraan dinas kepada satuan jajarannya, Senin (27/9). Kendaraan dinas yang dibagikan merupakan pengadaan TNI AD tahun anggaran 2020-2021 dan dukungan SKK Migas.

"TNI AD terus mengupayakan dan memperbaiki kualitas pengadaan atas kendaraan dinas yang didukung dengan teknologi mutakhir dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas-tugas TNI AD ke depan agar semakin lebih baik lagi," ujar Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Andika Perkasa, dalam keterangan tertulis, Selasa (28/9).

Adapun 353 unit kendaraan dinas yang dibagikan terdiri dari roda empat sebanyak 118 unit dan roda dua sebanyak 235 unit.

Secara lebih rinci, jenis kendaraan tersebut meliputi tansporter heavy scania 8 unit, kendaraan dapur lapangan 20 unit, Pajero Sport 6 unit, ambulans 5 unit, tactical reinforced vehicle (TRV) 25 unit, dan kendaraan jammer 4 unit.

Kemudian ILSV J-Forces Armored 4 unit, kendaraan P6 ATAV 26 unit, kendaraan penarik Meriam MAZ 8 unit, kendaraan Tata Daewoo 12 unit, sepeda motor trail Honda CRF 232 unit dan sepeda motor BMW Kawal Depan VIP 3 unit.

Ketua Komisi I DPR RI Meutya Viada Hafid yang menghadiri kegiatan pendistribusian menyambut positif atas terealisasinya pengadaan kendaraan dinas TNI AD. Menurutnya, pengadaan ini didukung alat utama sistem persenjataan (alutsista) dengan teknologi mutakhir.

"Bukan saja didukung teknologi paling mutakhir, sekaligus juga desain mutakhir yang dilakukan dengan hati," kata Meutya.

Meutya menilai, hal ini menjadi sangat sesuai dengan berbagai temuan di lapangan. Dengan demikian, melalui pengadaan kendaraan dinas ini, diharapkan dapat memperbaiki kinerja TNI AD di masa mendatang. ● **han**

PT PELAYARAN NASIONAL
BINA BUANA RAYA Tbk

PT PELAYARAN NASIONAL BINA BUANA RAYA Tbk DAN ENTITAS ANAK

TCC Batavia Tower One, 8th floor, Jl. KH. Mas Mansyur Kav.126, Jakarta 10220

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
PER 30 JUNI 2021 DAN 31 DESEMBER 2020
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat)

ASET	2021	2020	LIABILITAS DAN EKUITAS	2021	2020
ASET LANCAR			**LIABILITAS JANGKA PENDEK**		
Kas dan Setara Kas	3.391.765	4.283.393	Utang Usaha		
Piutang Usaha			Pihak Berelasi	17.390.534	17.434.065
Pihak Berelasi	257.854	47.277	Pihak Ketiga	568.807	1.421.110
Pihak Ketiga	2.974.129	3.092.037	Utang Lain-lain		
Aset Keuangan Lancar Lainnya	3.552	358.360	Utang Pajak	46.155	66.235
Persediaan	3.725	45.137	Beban Akrual	551.905	1.444.004
Pajak Di bayar di Muka	142	37.376	Jaminan Pelanggan	116.200	2.106.892
Biaya Dibayar di Muka	237.542	115.834	Pendapatan yang Ditangguhkan	--	38.644
Jumlah Aset Lancar	6.868.709	7.979.414	Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	18.673.601	22.510.950
			LIABILITAS JANGKA PANJANG		
ASET TIDAK LANCAR					
Aset Tetap	26.372.710	29.020.370	Utang Pihak Berelasi - Non Usaha	7.354.362	7.354.362
Aset Tidak Lancar Lainnya	230.782	213.574	Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Panjang	122.216	157.056
Jumlah Aset Tidak Lancar	26.603.492	29.233.944	Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	7.476.578	7.511.418
			JUMLAH LIABILITAS	**26.150.179**	**30.022.368**
			EKUITAS		
			Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk:		
			Modal Saham - Nilai Nominal Rp 100 per saham		
			Modal Dasar - 7.000.000.000 saham		
			Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh - 5.367.076.248 saham	54.270.862	54.270.862
			Tambahan Modal Disetor	33.628.332	33.628.332
			Pendapatan Komprehensif Lainnya	470.794	442.867
			Saldo Laba / (Defisit)		
			Telah ditentukan penggunaannya	30.000	30.000
			Belum ditentukan penggunaannya	(80.625.393)	(80.728.498)
			Saham Diperoleh Kembali	(452.573)	(452.573)
			Jumlah Ekuitas	**7.322.022**	**7.190.990**
JUMLAH ASET	**33.472.201**	**37.213.358**	**JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS**	**33.472.201**	**37.213.358**

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE-PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR PADA PADA TANGGAL 30 JUNI 2021 DAN 2020
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat)

	2021	2020
PENDAPATAN	**3.290.899**	**7.432.580**
BEBAN LANGSUNG	**(2.737.286)**	**(7.059.032)**
LABA/(RUGI) BRUTO	**553.613**	**373.548**
Beban Usaha	(871.806)	(842.805)
Pendapatan Lainnya	608.113	163.236
Beban Lainnya	(47.136)	(80.147)
LABA/(RUGI) USAHA	**242.784**	**(386.168)**
Biaya Keuangan	(102.683)	(993.867)
LABA/(RUGI) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	**140.101**	**(1.380.035)**
Beban Pajak Penghasilan	(36.996)	(84.849)
LABA/(RUGI) PERIODE BERJALAN	**103.105**	**(1.464.884)**
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN SETELAH PAJAK PENGHASILAN		
Pos-pos Yang Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi :		
Keuntungan Aktuarial atas Program Imbalan Pasti - Setelah Pajak Penghasilan	27.927	--
Penghasilan Komprehensif Lain Periode Berjalan Setelah Pajak	27.927	-
JUMLAH LABA/(RUGI) KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN	**131.032**	**(1.464.884)**
JUMLAH LABA/(RUGI) PERIODE BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK	**103.105**	**(1.464.884)**
JUMLAH LABA/(RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK	**131.032**	**(1.464.884)**
RUGI PER SAHAM DASAR	0,000019	(0,000273)

LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE-PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 30 JUNI 2021 DAN 2020
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat)

	2021	2020
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Penerimaan dari Pelanggan	2.890.546	6.772.063
Pembayaran kepada Pemasok dan Pihak Lainnya	(2.661.107)	(4.574.504)
Pembayaran kepada Karyawan	(766.632)	(1.649.922)
Pembayaran Pajak Penghasilan	(34.716)	(84.849)
Pembayaran Biaya Keuangan	(104.196)	(892.215)
Penerimaan Klaim Asuransi	49.212	--
Penerimaan Pendapatan Bunga	7.717	--
Arus Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi	(619.176)	(429.427)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Hasil Penjualan Aset Tetap	282.437	1.475.896
Perolehan Aset Tetap. bersih	(588.460)	(116.419)
Arus Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Investasi	(306.023)	1.359.477
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Pembayaran Pinjaman Bank	--	(1.683.050)
Arus Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan	--	(1.683.050)
PENURUNAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS	(925.199)	(753.000)
DAMPAK PERUBAHAN KURS TERHADAP KAS DAN SETARA KAS	33.571	65.289
KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL PERIODE	4.283.393	3.876.219
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR PERIODE	**3.391.765**	**3.188.508**
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR PERIODE TERDIRI DARI:		
Kas	8.011	9.023
Bank	3.383.754	3.078.447
Deposito Berjangka	--	101.038
Total	**3.391.765**	**3.188.508**

Catatan:

- Informasi keuangan di atas pada tanggal dan untuk periode-periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan 2020 diambil dari laporan keuangan konsolidasian yang diaudit.
- Informasi keuangan di atas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 diambil dari laporan keuangan konsolidasian yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hertanto, Grace, Karunawan (Member Firm of TIAG) yang dalam laporannya telah memberikan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian atas laporan keuangan konsolidasian tersebut.
- Karena informasi keuangan di atas diambil dari Laporan Keuangan Konsolidasian dengan demikian, informasi tersebut bukan merupakan penyajian yang lengkap dari Laporan Keuangan Konsolidasian.

Jakarta, 29 September 2021
Direksi